



KETIDAKBERLANJUTAN DALAM KONSUMERISME PARIWISATA: SEBUAH TINJAUAN KRITIS

Ray March Syahadat, Hendrie Adji Kusworo

Program Doktor Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
Email: ray.march.syahadat@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Keberhasilan industri pariwisata selama ini lebih banyak diukur secara kuantitatif sehingga cenderung mengabaikan nilai-nilai yang tidak terlihat di dalamnya. Beberapa pengembangan konsumerisme dalam pariwisata meskipun memperoleh keuntungan secara finansial tanpa disadari dapat menimbulkan kerugian apabila abai dalam mengidentifikasi sumber-sumber kebocorannya. Artikel ini merupakan tinjauan kritis yang bertujuan untuk memberikan wawasan terhadap topik ketidakberlanjutan dalam konsumerisme pariwisata. Berdasarkan hasil analisis, ketidakberlanjutan tersebut dapat dilihat dari penurunan kualitas lingkungan, pemborosan dan kebocoran ekonomi, serta perubahan sosial.

Kata Kunci: dampak pariwisata, dimensi pariwisata, kebocoran ekonomi.

UNSUSTAINABILITY IN TOURISM CONSUMERISM: A CRITICAL REVIEW

ABSTRACT

The success of the tourism industry is more quantitatively measured so it tends to ignore values that are not visible in it. Some consumerism developments in tourism even though they are financially profitable, it can actually losses if they fail to identify the sources of the leakage. This article is a critical review that aims to provide insight into the topic of unsustainability in tourism consumerism. Based on the results of the analysis, the unsustainability can be seen from the decline in environmental quality, economic waste and leakage, as well as social changes.

Keywords : *tourism impact, tourism dimension, economic leakage*

Copyright ©2022. UHN I GB Sugriwa Denpasar. All Right Reserved



I. PENDAHULUAN

Ketidakberlanjutan dalam pariwisata merupakan hal yang menarik jika dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Berkaca pada Indonesia, tentu tidak asing bagi kita ketika mendengar pemerintah menargetkan jumlah kunjungan tertentu setiap tahunnya. Artinya kuantitas masih menjadi patokan sebuah keberhasilan di bidang ini. Akibat fokus kepada jumlah kunjungan, besar pengeluaran, lama tinggal, banyak sekali hal-hal yang diabaikan dalam hal ini dari sudut pandang kualitas. Artikel yang ditulis Brohman (1996) merupakan artikel yang menarik untuk menjadi pembukaan dalam tulisan ini. Artikel ini berusia seperempat abad ini memberikan informasi yang sangat penting terhadap perkembangan pariwisata bagi negara-negara dunia ketiga yang di dalamnya termasuk Indonesia. Dunia ketiga merupakan istilah yang kini memang jarang digunakan lagi. Dunia ketiga merujuk pada negara-negara yang tidak memihak pada saat perang dingin berlangsung. Sejak Uni Sovyet bubar, negara dunia ketiga lebih sering disebut sebagai negara berkembang.

Brohman menganggap bahwa salah satu ancaman bagi pariwisata negara dunia ketiga yaitu terletak pada ketergantungan asing yang berlebihan, kebocoran pendapatan pariwisata, timbulnya neokolonialisme, penguatan sosial ekonomi, dan ketidaksetaraan spasial, kerusakan lingkungan, dan meningkatnya keterasingan budaya. Ia berpendapat mekanisme kelembagaan perlu ditingkatkan dan dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata yang diukur sesuai dengan perubahan kondisi dan kepentingan setiap komunitas sebagai *host*. Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat berdampak jangka panjang. Artikel ini secara umum menyimpulkan bahwa pariwisata dunia ketiga selama ini fokus pada hal-hal yang kuantitatif seperti jumlah kunjungan, lama tinggal, dan besar pengeluaran. Padahal meskipun angka-angka itu tercapai tetapi tidak disadari oleh mereka secara kualitas terjadi banyak penurunan di segala aspek. Hal ini disebut oleh Holden (2000) dalam bukunya yang berjudul *Environment and Tourism*, pariwisata memang dipandang sebagai industri tanpa asap tetapi sesungguhnya asap itu tidak terlihat. Sebuah kritik yang cukup menggelitik.

Seperempat abad tulisan Brohman dipublikasikan, bagaimana kondisi di Indonesia saat ini? Sejauh ini nampaknya Indonesia masih belum jauh dari yang digambarkan oleh Brohman. Hal ini terlihat dari saat ini tolak ukur keberhasilan pariwisata di Indonesia memang masih selalu dipandang secara kuantitas bukan kualitas (Aryani et al., 2017; Hermawan, 2016; W. Kurniawan, 2015). Bahkan setiap tahun kita sering mendengar bahwa pemerintah selalu mengumumkan target jumlah wisatawanannya dan membandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Dampaknya bagi daerah-daerah yang jumlah kunjungan wisatanya rendah, terkesan menganggap bahwa pariwisata bukan sektor penting yang harus diperhatikan. Padahal ada dimensi-dimensi lain yang sesungguhnya tidak diperhitungkan atau mungkin tidak disadari. Mengakar pada teori *triple bottom line*, perspektif keberlanjutan dapat dilihat dari tiga dimensi utama yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Brohman (1996) dalam kesimpulannya mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan melibatkan masyarakat. Saat ini di Indonesia pengembangan pariwisata berbasis masyarakat bisa dikatakan sedang digandrungi. Hal ini dibuktikan dari banyaknya penelitian yang mengambil topik mengenai hal tersebut (Rusyidi & Fedryansah, 2018; Sanjaya, 2018; Suasapha, 2016). Hasilnya memang banyak dilaporkan berhasil namun belum banyak yang melaporkan tentang kesuksesannya secara kualitatif terutama dari dimensi yang berbeda. Penelitian-penelitian sejenis juga cenderung mengabaikan faktor-faktor yang sesungguhnya menarik untuk diinformasikan seperti *leakage* dan *enclave tourism*. Informasi mengenai sisi negatif dari sebuah fenomena sesungguhnya sangat penting karena dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan rencana dan kebijakan pariwisata. Melihat adanya

celah tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan kritis terhadap ketidakberlanjutan dalam konsumerisme pariwisata.

II. METODE

Artikel ini merupakan sebuah tinjauan kritis. Oleh karena itu metode yang digunakan yaitu studi literatur. Pendekatan yang digunakan merujuk pada Asy'ari et al. (2021) serta Bala & Verma (2018) yaitu menyarikan artikel-artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal. Artikel yang digunakan tidak dibatasi rentang tahun karena sudut pandang yang digunakan diawali dari perkembangan sejarah hingga fenomena yang terjadi saat ini. Artikel mengenai ketidakberlanjutan konsumsi dalam pariwisata diperoleh dari Google Scholar. Artikel-artikel yang diperoleh kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama yaitu dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial yang merupakan perspektif keberlanjutan (*triple bottom line*). Selanjutnya artikel kembali diseleksi sehingga artikel yang digunakan benar-benar sesuai dengan tema dan topik yang ingin dianalisis. Kemudian seluruh artikel dianalisis secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Lingkungan

Becken (2005) pernah melaporkan hal menarik terkait dengan *leakage* dan *enclave tourism* dalam penelitiannya di Selandia Baru. *Leakage* dan *enclave tourism* yang dibahas olehnya merupakan nilai yang tidak terlihat sebagai dampak dari pembangunan pariwisata yang tidak berkelanjutan. Penelitian tersebut memberikan pandangan terhadap pemanfaatan ikon wisata dalam media promosi yang menyebabkan ketidakseimbangan regional. Iswanto (2015) menyatakan bahwa ketidakseimbangan regional juga akan memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan daerah. Becken (2005) juga memandang fenomena ini sebagai ancaman karena tidak hanya akan menimbulkan ketimpangan pembangunan dan pendapatan, tetapi juga masalah lingkungan. Ia mencoba memprediksi jejak karbon yang dihasilkan terhadap titik-titik ikon wisata yang dalam perencanaan daerah pengembangan hanya fokus kepada area sekitar objek, yang selama ini diabaikan konektornya yang sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Jejak karbon ini dianggap penting karena memiliki nilai ekonomi yang tidak terlihat.

Isu-isu mengenai lingkungan terhadap ketidakberlanjutan pariwisata selalu menjadi isu yang menarik. Brohman (1996) juga menawarkan perihal pengembangan wisata alternatif sebagai salah satu solusi dalam menjawab isu lingkungan sekaligus ekonomi. Ketika menjawab mengenai isu lingkungan dan pariwisata tentu tidak lepas dengan kata ekowisata yang belakangan menjadi sebuah tren akan kebutuhan terhadap kelestarian lingkungan. Seberapa efektifnya hal tersebut? Sharpley (2006) memiliki pandangan yang menarik terhadap hal tersebut. Selama seperempat abad terakhir, pasokan dan permintaan ekowisata telah tumbuh secara signifikan. Ekowisata, sebagai salah satu bentuk pengembangan pariwisata, semakin diakui dan dilegitimasi sebagai alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah tujuan. Ada asumsi bahwa wisatawan sendiri menuntut bentuk pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Namun, sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekowisata telah didorong oleh permintaan karena benar-benar peduli terhadap lingkungan.

Akar dari minat yang meningkat pada ekowisata ini pada dasarnya terletak pada munculnya gerakan pariwisata alternatif sebagai tanggapan atas meningkatnya keprihatinan atas konsekuensi negatif dari pariwisata massal konvensional. Bentuk pariwisata yang secara

positif menguntungkan lingkungan, masyarakat dan budaya lokal. Perhatian akademis yang diberikan pada ekowisata berkaitan dengan sifat pasokan atau, mungkin lebih tepat, pasokan alam. Dukungan untuk pengembangan ekowisata juga sering didasarkan pada asumsi bahwa wisatawan menjadi 'lebih hijau' dan, karenanya, menuntut pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan lingkungan.

Istilah ekowisata diterapkan pada berbagai produk, aktivitas dan pengalaman pariwisata yang hanya terkait dengan keberadaannya di tempat-tempat alami. Prinsip dasarnya tidak semata-mata terlihat lebih natural tetapi lebih kepada tanggung jawab wisatawan termasuk kepada interaksi dengan lingkungan dan komunitas lokal. Jadi kata kunci ekowisata adalah tanggung jawab. Lalu siapakah ekowisatawan itu? Setidaknya ada tiga fase yang perlu dicapai untuk menjadi ekowisatawan. Pertama pada fase praperjalanan yaitu menjadi 'ahli' ekowisata yang berpengetahuan. Artinya sebelum melakukan perjalanan ekowisatawan mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui kondisi lingkungan yang akan dikunjunginya. Kedua pada fase perjalanan, seorang ekowisatawan memiliki tanggung jawab dalam terhadap lingkungan dan komunitas lokal. Terakhir fase pascaperjalanan, ekowisatawan seharusnya lebih mengembangkan pengetahuan dan apresiasi. Jadi pemahaman bahwa ekowisata adalah konsumerasi hijau adalah sesuatu yang sangat dangkal karena konsumerasi hijau hanyalah sebgaiian kecil dari prinsip ekowisata tersebut. Hal inilah yang menjadi permasalahan karena orang ketika memilih ekowisata sebagai pilihan umumnya hanya sebagai pembentuk citra diri dan dimanfaatkan dengan marketing untuk mendapatkan provit dari fenomena ini.

Penelitian terkait ketidakberlanjutan terhadap lingkungan dalam pariwisata bisa dikatakan perkembangannya cukup baik karena ilmu lingkungan merupakan kelompok ilmu pasti sehingga relatif mudah untuk diukur. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh de Araújo & da Costa (2007). Penelitiannya mengambil lokasi di Kota Tamandare yang terletak di bagian selatan Negara Bagian Pernambuco, Brazil dengan garis pantai sekitar 9 km. Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi kota dan masyarakatnya, tetapi dapat menyebabkan masalah sanitasi dan lingkungan yang sulit dipecahkan terutama di sepanjang tepi pantai. Dampak nyatanya adalah pencemaran visual oleh sampah pada pesisir pantai.

Penelitian tersebut menyimpulkan penghilangan vegetasi bukit pasir asli telah menyebabkan hilangnya lebar pantai dan pada saat air pasang, air dapat mencapai pertahanan dan dinding laut, mencegah pengendapan/penumpukan sedimen dan limbah padat. Selama musim ramai (musim panas austral), ada peningkatan yang signifikan dalam aliran orang yang menggunakan bagian depan laut dan pantai. Akibatnya, mereka menghasilkan lebih banyak limbah padat. Namun, area pantai yang lebih sempit dijaga relatif bersih karena limbah padat terus-menerus terbawa arus dan mungkin dibawa ke area lain dengan kondisi akumulasi sedimen yang lebih mudah. Vegetasi bertindak sebagai perangkap alami di mana limbah menjadi tidak dapat diakses oleh aliran pasang surut harian. Peningkatan jumlah sampah yang berkorelasi dengan kepadatan wisatawan. Perencanaan dan desain tempat wisata tidak berwawasan lingkungan (mengabaikan elemen alami) akan memperparah pencemaran sampah dan visual tempat. Apakah akan terus membiarkan perilaku membuang sampah? Sampai kapan keberadaan sampah dianggap kewajaran? Berapa besar kerugian yang ditimbulkan jika dihitung secara ekonomi akibat masalah sampah tersebut?

Tidak hanya di Brazil, di Indonesia juga terjadi hal demikian. Parahnya, kejadian kerusakan lingkungan disebabkan oleh euforia terhadap tempat wisata baru yang tidak dibarengi dengan pengelolaan dan pendidikan lingkungan oleh masyarakat. Kurniawan et al. (2017) melaporkan kajian ini di Gili Labak, Madura. Kerentanan pulau kecil terhadap wisata

dapat dilihat dari perubahan garis pantai, perubahan luasan terumbu karang, perubahan karang hidup, dan meningkatnya area terbangun. Jika tingkat kerentanan terus meningkat, maka keberlanjutan wisata di pulau kecil tidak dapat dicapai. Aktivitas wisata di Gili Labak sangat bergantung pada kondisi ekologi yang ada, misalnya wisata selam dan *snorkeling* terhadap terumbu karang, rekreasi terhadap pantai, dan lain-lain. Sangat disayangkan karena ketidaksiapan *stakeholders* dalam menyambut euforia tersebut, akhirnya merusak keindahan Gili Labak dan akhirnya ditinggalkan masyarakat dan berdampak pada ekonomi.

Ketidakterlanjutan dari dimensi lingkungan dewasa ini sudah perlahan-lahan sudah mulai dapat diminimalisasi meskipun belum optimal. Kajian ekologi terhadap dampak pada lingkungan selalu ditekankan sejak dalam tahapan perencanaan wisata. Terlebih upaya-upaya pelestarian lingkungan menjadi mudah karena telah banyak kajian yang mendukungnya. Permasalahan dan juga menjadi tantangan yaitu pendekatan arsitektural yang digunakan sejauh ini nampaknya kurang mampu mempersuasi perilaku wisatawan untuk ramah terhadap lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan lebih banyak kajian sebagai salah satu strategi untuk mengubah perilaku melalui pendekatan arsitektural sembari tetap menguatkan edukasi kepada wisatawan dan didukung dengan kelembagaan berupa penguatan peraturan yang berlaku.

Dimensi Ekonomi

Ketidakterlanjutan dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari besaran nilai-nilai yang dikonversi ke dalam mata uang. Nilai manfaat ekonomi terhadap lingkungan pernah dilaporkan oleh Witomo et al. (2020). Studi dilakukan di Taman Wisata Perairan Gita Nada Sekotong, Lombok - NTB. Penelitian ini menggunakan analisis Zona Travel Cost Method (ZTCM). Hasil studi menunjukkan bahwa dengan luas terumbu karang sebesar 1279 ha, Taman Wisata Perairan Gita Nada Sekotong memiliki nilai manfaat pariwisata Rp3.004.031.073/ha dengan jumlah total pengunjung per 1000 penduduk pada kedua zona adalah sebanyak 51.228 orang. Berdasarkan model fungsi permintaan pariwisata menunjukkan bahwa pertimbangan individu sangat dipengaruhi oleh besaran biaya perjalanan dan karakteristik sosial ekonomi. Namun kelemahan model dalam penelitian ini adalah hanya bisa menjelaskan 58,2% faktor yang memiliki pengaruh terhadap kunjungan wisata Taman Wisata Perairan Gita Nada.

Suryawardani et al. (2014) mencoba menghitung kebocoran ekonomi di Bali. Hal yang melatarbelakangi studi tersebut karena pariwisata berdampak pada ekonomi pembangunan belum sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat Bali. Selanjutnya, pengeluaran turis juga belum sepenuhnya tersisa dalam perekonomian Bali. Kebocoran pariwisata, dalam bentuk pembayaran untuk produk dan jasa impor, pembayaran gaji pegawai asing, dan keuntungan ditransfer ke pemilik asing. Penelitian ini memperkirakan jumlah kebocoran pariwisata dari akomodasi sektor di Bali melalui analisis mikro di tingkat industri. Hasilnya menunjukkan bahwa persentase kebocoran tertinggi terjadi pada jaringan hotel bintang 4 dan 5, yaitu 51,0% dari pendapatan total. Diikuti oleh hotel non-jaringan bintang 4 dan 5 (22,7%), dan hotel bintang 1, 2, dan 3 (12,0%). Sedangkan kebocoran terendah terjadi pada non-hotel berbintang (8,8%).

Penelitian lain yang melaporkan kebocoran ekonomi lebih spesifik pada bidang usaha gastronomi dilaporkan Qian et al. (2019). Studi yang dilaksanakan di Tiongkok ini melaporkan hal yang membuat kita akan berpikir untuk tidak membuang-buang makanan. Tiongkok dikenal luas dengan makanan lezat, anggur, dan tradisi kulinernya. Banyak kota di Tiongkok telah terdaftar oleh UNESCO sebagai ibu kota gastronomi dunia. Pengeluaran makanan wisatawan Tiongkok mencapai RMB 4000 miliar dan meningkat 10,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Turis gastronomi umumnya percaya bahwa makanan

di suatu tempat tujuan memiliki empat makna yaitu sosial, psikologis, budaya, dan pengalaman. Hal ini membuat pemerintah mendukung dipopulerkannya perjalanan gastronomi di negeri tirai bambu tersebut. Dari perspektif sosial ekonomi, perjalanan gastronomi bermanfaat namun kekurangannya yang tidak bisa dihindari yaitu pemborosan. Wisatawan di Tiongkok rata-rata membuang 109 gram makanan, sedangkan penduduk setempat membuang 88 gram per makanan. Pemborosan makanan turis tampaknya lebih tinggi daripada penduduk lokal. Perilaku ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga memperburuk citra turis Tiongkok di dunia. Dalam jangka panjang, praktik semacam itu akan mengarah pada pengembangan pariwisata masuk dan keluar Tiongkok yang tidak berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab fenomena ini dapat dipandang menjadi tiga sudut pandang yaitu sisi wisatawan, industri, dan pemerintah. Sisi wisatawan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Generasi Y menganggap 'wajah' merupakan atribut dominan yang mendorong wisatawan muda Tiongkok untuk membuang-buang makanan selama berwisata. Melalui konteks Tiongkok, 'wajah' mengacu pada citra sosial seseorang, dan telah menarik perhatian akademis yang luas dalam sosiologi dan psikologi. Beberapa penyebab yang menjadi alasan mereka membuang makanan dari penelitian ini antara lain: 1) selalu ingin mencoba tetapi bukan selera; 2) pemandu mengejar *reward* dari penjual makanan; 3) membeli untuk oleh-oleh tetapi tidak disukai penerima; 4) mengemas makanan hal yang memalukan 5) tidak dapat menahan godaan untuk membeli lebih banyak; 6) kebiasaan/didikan keluarga memanjakan anak; 7) memesan banyak makanan artinya murah hati; 8) tradisi tuan rumah harus menyajikan lebih banyak makanan untuk tamu; 9) menghabiskan/mengemas makanan dianggap rakus; dan 10) menyisakan makanan di meja adalah hal yang biasa dilakukan di Tiongkok.

Sisi industri dipengaruhi oleh tujuh faktor antara lain: 1) *food court* tidak menyajikan makanan yang enak; 2) pemaksaan dari penjual (bukan Tiongkok modern); 3) lokasi terbatas, banyak yang mengantre sehingga harus makan dengan cepat; 4) terlalu komersial, tidak ingin menciptakan citra yang baik; 5) operasi bisnis makanan seperti itu berkontribusi pada pembangunan destinasi yang tidak berkelanjutan; 6) ketidakjujuran penjual; dan 7); non-pribumi membuat dan menjual makanan lokal kepada turis non-pribumi yang mencari keaslian. Selanjutnya dari sisi pemerintah penyebab fenomena ini dipandang akibat faktor-faktor: 1) pemerintah menyadari pentingnya pariwisata dalam mengembangkan ekonomi lokal di China sehingga memilih gastronomi sebagai salah langkah yang menjanjikan; 2) beberapa tempat, minimnya atraksi membatasi perkembangan pariwisata lokal sehingga mengembangkan kuliner; 3) pemerintah menganggap gastronomi merupakan sektor yang lebih murah dan mudah; 4) tanpa melihat bahwa efeknya tidak selalu menguntungkan; 5) banyak kuliner yang sama saja antar daerah; 6) menyebabkan pasar membandingkan dengan yang lebih enak dengan pengalaman sebelumnya; 7) pemerintah mendorong untuk memasak masakan tradisional untuk menciptakan bisnis tetapi berujung pada persaingan antar pedagang. Studi ini lebih membahas dimensi sosial sedangkan ekonomi menjadi salah satu dampak namun tidak begitu dibahas lebih lanjut. Sisi keberlanjutan dari dimensi sosial-ekonomi pada artikel ini memberikan informasi yang baru tetapi masih sangat normatif. Meskipun demikian dari studi-studi yang telah dilaporkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya kebijakan dan perencanaan yang berdasarkan pengalaman bukan hanya yang bersifat positif tetapi juga negatif. Diharapkan dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, segala resiko buruk yang dapat terjadi dapat diminimalisasi sedari dini.

Dimensi Sosial

Nugraheni et al. (2019) memberikan angin segar terhadap indikator keberlanjutan dari pandangan sosial yang selama ini jarang dilirik basis filsafatnya. Studi ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan sosial dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan kondisi dan proses dalam pariwisata yang terkait dengan bagaimana pariwisata masyarakat, komunitas, individu dan pemerintah hidup bersama, bertujuan untuk melaksanakan tujuan model pariwisata berkelanjutan, serta mempertimbangkan batas-batas fisik tujuan pariwisata dan planet bumi secara keseluruhan. Definisi ini menyoroti hubungan antara masyarakat pariwisata, komunitas, individu, dan pemerintah untuk mencapai kondisi sosial yang memberikan keadilan. Begitu juga dengan kualitas hidup yang baik di industri pariwisata dengan memperhatikan kesetaraan, pemerataan, pekerjaan, kesehatan, kohesi sosial, pendidikan dan pengetahuan, sosial infrastruktur, dukungan masyarakat, dan aksesibilitas. Selanjutnya tata kelola yang baik, lokal pembelian, partisipasi publik, melindungi dan meningkatkan warisan budaya, swasembada ekonomi, serta menopang kepuasan dan etika wisatawan.

Fenomena ketidakberlanjutan pada dimensi sosial dapat dilihat dari aspek pemenuhan kebutuhan konsumen. Selama ini pengembangan industri pariwisata cenderung menyiapkan masyarakat lokal dalam menyediakan kebutuhan konsumen dalam hal ini wisatawan. Hal ini membuat wisatawan dapat berbuat apa saja dan masyarakat lokal hanya dapat memaklumi. Belum banyak penelitian yang mengkaji hal ini tetapi beberapa penelitian pernah melaporkan secara tidak langsung dampaknya.

Kurniawan (2015) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa pengembangan objek wisata Umbul Sidomukti di Semarang dapat mengurangi masalah sosial seperti pengangguran namun menimbulkan persaingan usaha dalam masyarakat yang umumnya beralih profesi ke industri pariwisata. Hamzah et al. (2018) dalam laporannya terhadap studi di Desa Borobudur menyatakan bahwa dampak negatif dari industri pariwisata di sana antara lain konversi profesi dari petani menjadi pelaku usaha wisata sehingga menghilangkan kearifan lokal mereka. Selain itu, terjadi perubahan pola konsumsi lokal yang cenderung mengikuti *trend* yang salah satunya dibawa oleh wisatawan asing, kepadatan pedagang, serta penurunan kualitas keamanan. Lebih lanjut Yusrizal & Asmoro (2020) pada studinya di Yogyakarta banyak melaporkan masalah sosial yang menimbulkan konflik baik realistik maupun nonrealistik. Konflik terjadi karena munculnya kelompok masyarakat pendatang yang juga sama-sama ingin menangkap peluang dari pariwisata.

Arahan Penelitian Kedepan

Masih banyak hal yang menarik dan dapat digali dari nilai-nilai yang tak terlihat dalam konsumerisme pariwisata. Sayangnya pengertian pariwisata itu sendiri membuat bias sehingga definisi nilai yang tak terlihat yang dapat menciptakan resiko *leakage* dan *enclave tourism* juga makin bias untuk dihitung dugaan nilainya. Cooper (2008) mendefinisikan pariwisata adalah perpindahan sementara ke tujuan di luar rumah dan tempat kerja biasa, kegiatan dilakukan selama tinggal dan fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Namun seberapa jauh pengertian itu dapat mendefinisikan pariwisata yang dinamis mengikuti perubahan temporal sosial masyarakat? Burkart & Medlik (1974) menyatakan bahwa definisi pariwisata yang tepat diperlukan untuk berbagai tujuan. Pertama, untuk tujuan studi atau pendidikan. Kedua, untuk tujuan statistik agar suatu fenomena diukur. Ketiga, untuk tujuan legislatif dan administratif. Keempat, untuk keperluan industri sehingga kegiatan ekonomi tertentu dapat memunculkan studi pasar dan menyediakan wadah bagi

pembentukan organisasi industri. Bahkan di Indonesia istilah *tourism* dibedakan menjadi tiga berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2009 yaitu wisata, pariwisata, dan kepariwisataan.

UNWTO memberikan batasan-batasan mengenai pengertian pariwisata. UNWTO memperhatikan prinsip-prinsip politik, komersial dan normatif dan tidak mendekati aspek konseptual. Definisinya diadopsi oleh beberapa negara dan organisasi dan telah menjadi definisi resmi pariwisata. Adapun definisi teknisnya adalah aktivitas orang-orang yang bepergian ke dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan biasanya selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan aktivitas yang dibayar dari dalam tempat yang dikunjungi. Lalu pengertian ini dikritik karena orang-orang yang juga bepergian untuk bekerja sebagian besar dan sangat memungkinkan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas untuk berwisata. Dewasa ini juga kata pariwisata terutama dikaitkan dengan perjalanan rekreasi dan dalam banyak kasus orang tidak suka mengakui bahwa mereka adalah turis (Netto, 2009).

Nilai ekonomi dari pariwisata juga akhirnya menjadi bias karena dihitung berdasarkan lapangan usaha. Lapangan usaha yang digunakan di BPS juga terbatas pada hotel, restoran, transportasi serta telekomunikasi. Informasi dari BPS juga dapat dikatakan terbatas karena umumnya menggunakan angka berdasarkan pintu masuk kedatangan (Mudrikah et al., 2014). Tetapi, apakah data-data yang ditunjukkan benar merupakan biaya yang dikeluarkan hanya oleh wisatawan? Jika tidak maka kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk memberikan metode bagaimana memprediksi besar pengeluaran tersebut terkait dengan kemanfaatan pariwisata. Masih dari hasil penelitian yang dilakukan Mudrikah et al. (2014), hitungan-hitungan nilai ekonomi baru bisa mendeskripsikan berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan luar negeri. Hal ini dimaklumi karena penulis memang membatasi kajiannya terhadap PDB. Sejauh ini belum ada penelitian yang mencoba menggali informasi kontribusi wisatawan lokal antar daerah kabupaten/kota. Padahal hal tersebut juga penting terhadap PDRB.

Selanjutnya, jika merujuk pada definisi-definisi pariwisata di atas dan kita kaitkan dengan ide untuk menghitung *leakage* dan *enclave tourism* maka muncul pertanyaan. Apakah hal itu hanya bisa didefinisikan untuk kegiatan wisata antar negara? Bagaimana hubungannya dengan antar provinsi? Atau antar kabupaten/kota? Mungkin jika antar negara hal itu memberikan efek dominan negatif. Namun, jika batasannya kita turunkan antar kabupaten/kota hal tersebut nampaknya bisa menjadi positif dilihat dari bagaimana daerah saling *men-support* ekonomi mereka melalui kegiatan pariwisata antar sesama mereka. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial? Oleh karena itu memang diperlukan penelitian kedepan untuk menjawab fenomena tersebut.

IV. SIMPULAN

Dimensi lingkungan melihat ketidakberlanjutan dalam konsumerime pariwisata dari penurunan kualitas lingkungan. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah cenderung hanya dibuka tanpa memperhatikan daya dukung dan sistem ekologi di dalamnya. Meskipun demikian ketidakberlanjutan dari dimensi ini sudah mengarah pada perbaikan yang lebih baik karena kajian ekologi telah banyak dilakukan sebelum perencanaan wisata. Tantangannya yaitu penguatan kelembagaan dan juga kajian-kajian terkait mengubah perilaku tidak ramah lingkungan melalui pendekatan arsitektur serta pendidikan untuk menjadi wisatawan yang menghargai lingkungan.

Dimensi ekonomi terlihat dari pemborosan dan kebocoran ekonomi. Dalam rangka menyediakan kebutuhan konsumsi, sumberdaya yang digunakan bukan berasal dari lokal.

Selain itu pola konsumsi wisatawan tidak sesuai dengan apa yang disediakan sehingga menimbulkan tindakan pemborosan dari dua belah pihak. Tantangannya yaitu nilai-nilai kebocoran bisa lebih besar dari yang dibayangkan karena adanya bias tentang pemahaman mengenai pariwisata dan wisatawan itu sendiri. Oleh karena itu masih sangat dibutuhkan kajian-kajian yang menitikberatkan kepada paradigma pariwisata.

Dimensi sosial menandai dari perubahan sosial. Perubahan ini akibat masyarakat berubah menjadi majemuk. Selama ini masyarakat juga selalu dituntut untuk menjadi *tourist provider* yang baik, tetapi tidak diimbangi dengan menciptakan wisatawan yang baik. Belum begitu banyak penelitian yang mengarahkan pembahasan terhadap ketidakberlanjutan pariwisata yang dipandang dari konsumerisme serta kaitannya dengan masyarakat lokal maupun wisatawan. Hal ini akan menjadi peluang bagi para peneliti di bidang pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan manajerial untuk dunia pariwisata kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Program Doktor Kajian Pariwisata Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan wawasan, bimbingan, dan fasilitas selama penyusunan artikel.

REFERENSI

- Aryani, S. W., Sunarti, S., & Darmawan, A. (2017). Analisis Dampak Pembangunan Pariwisata Pada Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 49(2), 142–146.
- Asy'ari, R., Dienaputra, R. D., Nugraha, A., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Kajian Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata: Sebuah Studi Literatur. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya*, 6(1), 9–19.
- Bala, M., & Verma, D. (2018). A Critical Review of Digital Marketing. *International Journal of Management*, 8(10), 321–339.
- Becken, S. (2005). The Role of Tourist Icons for Sustainable Tourism. *Journal of Vacation Marketing*, 11(1), 21–30. <https://doi.org/10.1177/1356766705050840>
- Brohman, J. (1996). New directions in tourism for third world development. *Annals of Tourism Research*, 23(1), 48–70.
- Burkart, A. J., & Medlik, S. (1974). *Tourism: Past, Present and Future*. Heinemann.
- Cooper, C. (2008). *Tourism: Principles and Practice*. Pearson Education.
- de Araújo, M. C. B., & da Costa, M. F. (2007). Visual diagnosis of solid waste contamination of a tourist beach: Pernambuco, Brazil. *Waste Management*, 27(6), 833–839.
- Hamzah, F., Hermawan, H., & Wigati. (2018). Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, 5(3), 195–202.
- Hermawan, H. (2016). Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117.
- Holden, A. (2000). *Environment and Tourism*. Routledge.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 41–66.
- Kurniawan, F., Darus, R. F., & Rizaki, I. (2017). Kebutuhan Pengelolaan Wisata di Pulau Gili Labak, Sumenep: Euforia Destinasi Wisata Baru. *Coastal and Ocean Journal*, 1(2), 7–15.
- Kurniawan, W. (2015). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti

- Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 4(4), 443–451.
- Mudrikah, A., Sartika, D., Yuniarti, R., Ismanto, & Satria, A. B. (2014). Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Indonesia tahun 2004-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 3(2), 362–371.
- Netto, A. P. (2009). What is Tourism? Definitions, Theoretical Phases and Principles. In J. Tribe (Ed.), *Philosophical Issues in Tourism* (pp. 43–61). Channel View Publications.
- Nugraheni, A. I. P., Priyambodo, T. K., Sutikno, B., & Kusworo, H. A. (2019). Defining Social Sustainability and Socially Conscious Tourist in Sustainable Tourism Development. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 5(2), 264–276.
- Qian, J., Shen, H., Law, R., Chau, K. Y., & Wang, X. (2019). Examination of Chinese Tourists' Unsustainable Food Consumption: Causes and Solutions. *Sustainability*, 11(12), 1–12.
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155–165.
- Sanjaya, R. B. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *Jurnal Master Pariwisata Universitas Kristen Satya Wacana*, 5(1), 91–110.
- Sharpley, R. (2006). Ecotourism: A consumption perspective. *Journal of Ecotourism*, 5(1), 7–22.
- Suasapha, A. (2016). Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Pantai Kedoganan. *Jurnal Master Pariwisata (Jumpa)*, 2(2), 58–76.
- Suryawardani, I. G. O., Bendesa, I. K. G., Antara, M., & Wiranatha, A. S. (2014). Tourism leakage of the accommodation sector in Bali. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 13(1), 3–18.
- Witomo, C. M., Harahap, N., & Kurniawan, A. (2020). Nilai Manfaat Pariwisata Ekosistem Terumbu Karang Taman Wisata Perairan Gita Nada Sekotong Lombok. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 15(2), 169–184.
- Yusrizal, F., & Asmoro, A. Y. (2020). Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 92–105.

BIODATA PENULIS

Ray March Syahadat, merupakan pengajar di Program Studi Arsitektur Lanskap, Institut Sains dan Teknologi Nasional yang sedang menempuh pendidikan di Program Doktor Kajian Pariwisata, Universitas Gadjah Mada. Adapun Google Scholar ID penulis yaitu C_au1LcAAAAJ dan Scopus ID penulis 57197807630.

Hendrie Adji Kusworo, merupakan pengajar di Program Doktor Kajian Pariwisata, Universitas Gadjah Mada. Bidang keahlian beliau yaitu studi masyarakat, kelembagaan kewirausahaan, dan pengembangan sosial. Minat penelitiannya antara lain kelembagaan kewirausahaan, perubahan sosial, perencanaan sosial, dan pariwisata. Adapun Google Scholar ID penulis yaitu HN9pvyoAAAAJ&hl.